

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KANTOR CAMAT BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO

Amrain Mustafa
STIA Bina Taruna Gorontalo
musrain280@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu faktor kemampuan merencanakan, kemampuan melakukan pekerjaan, dan kemampuan melakukan komunikasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan skala likert bergradasi 5 yang disebarkan kepada 34 orang responden.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kemampuan merencanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada pada tingkatan sedang yaitu 3,05 dengan kategori kurang sesuai. Kemampuan melaksanakan pekerjaan penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada pada tingkatan sedang yaitu 2,73 dengan kategori kurang sesuai. Kemampuan melakukan komunikasi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada pada tingkatan tinggi yaitu 3,39 dengan kategori sesuai. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemampuan merencanakan, kemampuan melakukan pekerjaan, dan kemampuan melakukan komunikasi adalah kurang sesuai dengan perolehan skor 3,06 yang berarti berada pada tingkatan sedang.

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan merencanakan dengan mengikutsertakan para aparat kantor camat untuk mengikuti berbagai pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan mengikutsertakan para aparat kecamatan pada berbagai pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya, disamping perlu adanya pengawasan kontinyu dari pimpinan terhadap pelaksanaan tupoksi aparat kecamatan. kemampuan komunikasi agar lebih ditingkatkan terutama pada aspek pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Botumoito.

Kata Kunci: Penyusunan, Anggaran, Berbasis, Kinerja

PENDAHULUAN

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja. Selama ini, anggaran yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah melalui APBD, kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu disebabkan penyusunan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hanya didasarkan atas

rencana anggaran untuk memenuhi sebagian besar kepentingan operasional organisasi Pemerintah daerah. Sedang anggaran untuk memenuhi modal pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, kurang terakomodasi. Akibatnya kinerja atau hasil kerja Pemerintah Daerah hanya dalam kapasitas menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang terkesan menghabiskan anggaran.

Seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kecamatan, dalam membantu tugas bupati, diharapkan mampu menyusun berbagai program-program pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Penyusunan program seperti itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sedang pedoman penyusunan anggaran setiap SKPD didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan program pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Kantor Camat harus didasarkan pada anggaran yang terukur dan jelas hasil yang diperoleh.

Dengan demikian, diharapkan setiap pengeluaran anggaran, manfaatnya langsung dirasakan oleh

masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional yang didasarkan atas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), harus terukur secara jelas sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Efektif, apabila anggaran yang tersedia dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Efisien, jika anggaran tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas. Sehingga hasil yang diperoleh dapat terukur dan jelas, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka itu penyusunan perencanaan anggaran mempertimbangkan sasaran-sasaran dan prioritas yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang akan dihadapi, dan terutama kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Lebih penting, perencanaan anggaran sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumberdaya, dan menetapkan standar serta kualitas hasil.

Penyusunan anggaran, dengan demikian perlu mendapatkan perhatian terutama dari setiap pimpinan organisasi, bukan saja karena dibutuhkan untuk menunjang aspek internal dan aspek eksternal organisasi tetapi terutama dalam penggunaannya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, akan terjadi inefisiensi atau pemborosan anggaran. Penerapan otonomi daerah sebagai wujud atas pelimpahan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah,

sebagai peluang yang cukup besar untuk menentukan arah nasib warga masyarakat daerah atas dasar kemampuan dan sumber daya lokal. Agar kewenangan yang diberikan itu nyata dan memberi peluang yang cukup luas bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan kemampuan aparat dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Hal ini berarti bahwa keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terletak pada kemampuan aparat menyusun anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran. Kinerja organisasi Pemerintahan tidak lain adalah adanya manfaat hasil yang dirasakan oleh masyarakat umum. Dalam artian bahwa kemampuan organisasi tidak lain adalah kemampuan aparat sebagai perencana yang mampu menyusun anggaran berbasis kinerja. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan aparat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja ini.

Berdasarkan pengamatan, penyusunan anggaran di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo belum sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, tentang pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal itu disebabkan minimnya kemampuan aparat dalam menyusun anggaran yang berbasis kinerja, disertai minimnya penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, dan tidak adanya desentralisasi pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Selain

itu, aparat Kantor Camat belum mampu melakukan komunikasi dalam rangka penyediaan anggaran bagi kepentingan masyarakat di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

Camat sebagai pembantu Bupati, memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengelola program-program pembangunan secara mandiri. Anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan, lebih dominan berada pada SKPD di tingkat Kabupaten Boalemo. Sedang di tingkat kecamatan, kegiatan pembangunan lebih pada fungsi koordinasi. Posisi itulah yang melemahkan Camat sebagai pimpinan SKPD di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak dapat diakomodasi secara langsung dalam penyusunan program-program pembangunan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Kabupaten Boalemo?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran obyektif tentang faktor-faktor yang menghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor

Camat Botumoito Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, manfaat yang diharapkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang administrasi publik, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey tipe deskriptif.

Definisi operasional faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja, indikatornya adalah:

1. Kemampuan merencanakan, yaitu sebagai cara menyusun rencana anggaran yang bermanfaat, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemampuan melaksanakan pekerjaan, yaitu sebagai cara melaksanakan apa yang sudah direncanakan sesuai yang memiliki hasil kerja, tanggung jawab, kerja sama, dan umpan balik sebagai evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan.

3. Kemampuan melakukan komunikasi, yaitu sebagai cara melakukan hubungan dengan sesama aparat dan masyarakat dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo, sebanyak 34 orang.

Sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan karena populasinya kecil. sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan pendapat tersebut seluruh populasi sebanyak 34 orang dijadikan sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui: Observasi, Wawancara dan Telaah Dokumen.

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan sistem penyajian menggunakan tabulasi data untuk menentukan frekuensi, skor dan nilai persentase dari indikator penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Merencanakan

Kemampuan merencanakan, yaitu sebagai cara menyusun rencana anggaran yang bermanfaat, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

Selanjutnya Indikator kemampuan merencanakan ini kemudian dijabarkan ke dalam 3 item pertanyaan berikut: Perencanaan Anggaran yang sesuai dengan Situasi dan Kondisi, Kesesuaian Perencanaan Anggaran dengan Kegiatan Alternatif, dan

Kesesuaian Perencanaan Anggaran dengan Kebutuhan.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang perencanaan anggaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 2 orang atau 5,88%, responden yang menjawab sesuai 7 orang atau 20,58%, responden yang menjawab kurang sesuai 22 orang atau 64,70%, responden yang menjawab tidak sesuai 3 orang atau 3,82%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3,23, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 5), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 3,23 - 4,03, dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi melalui indikator kemampuan merencanakan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoitto Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan tinggi atau pada kategori sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian perencanaan anggaran dengan kegiatan alternatif adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 0 orang atau 0,00%, responden yang menjawab sesuai 3

orang atau 8,82%, responden yang menjawab kurang sesuai 21 orang atau 61,76%, responden yang menjawab tidak sesuai 6 orang atau 17,64%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 4 orang atau 11,76%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 2,67, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 5), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 2,42 - 3,22, dengan tingkatan sedang atau termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesesuaian perencanaan anggaran dengan kegiatan alternatif melalui indikator kemampuan merencanakan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoitto Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan sedang atau pada kategori kurang sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 0 orang atau 0,00%, responden yang menjawab sesuai 9 orang atau 26,47%, responden yang menjawab kurang sesuai 25 orang atau 73,52%, responden yang menjawab tidak sesuai 0 orang atau 0,00%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3,26, dan berdasarkan ketentuan

skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 7), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 3,23 - 4,03, dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan melalui indikator kemampuan merencanakan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan tinggi atau pada kategori sesuai.

Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan

Kemampuan melaksanakan pekerjaan, yaitu sebagai cara melaksanakan apa yang sudah direncanakan sesuai yang memiliki hasil kerja, tanggung jawab, kerja sama, dan umpan balik sebagai evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan. Aparat kantor camat harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemampuan melaksanakan pekerjaan oleh aparat kantor camat ini tampak pada penempatan aparat yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatan pekerjaannya, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian penempatan aparatur dengan jabatan kerja adalah : responden yang menjawab sangat

sesuai 0 orang atau 0,00%, responden yang menjawab sesuai 5 orang atau 14,70%, responden yang menjawab kurang sesuai 19 orang atau 55,88%, responden yang menjawab tidak sesuai 10 orang atau 29,41%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 2,85, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 8), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 2,42 - 3,22, dengan tingkatan sedang atau termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesesuaian penempatan aparatur dengan jabatan kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan sedang atau pada kategori kurang sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang ketersediaan sarana dan prasarana adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 0 orang atau 0,00%, responden yang menjawab sesuai 1 orang atau 2,94%, responden yang menjawab kurang sesuai 17 orang atau 50,00%, responden yang menjawab tidak sesuai 12 orang atau 35,29%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 4 orang atau 11,76%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar

2,44, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 9), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 2,42 - 3,22, dengan tingkatan sedang atau termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan sedang atau pada kategori kurang sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diharapkan adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 0 orang atau 0,00%, responden yang menjawab sesuai 8 orang atau 23,52%, responden yang menjawab kurang sesuai 15 orang atau 44,11%, responden yang menjawab tidak sesuai 11 orang atau 32,35%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 2,91, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 10), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 2,42 - 3,22, dengan tingkatan sedang atau termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diharapkan melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam

penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan sedang atau pada kategori kurang sesuai.

Kemampuan Melakukan Komunikasi

Kemampuan melakukan komunikasi, yaitu sebagai cara melakukan hubungan dengan sesama aparat dan masyarakat dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Komunikasi hendaknya dijalin dengan baik diinternal organisasi Kantor Camat Botumoito maupun eksternal organisasi yaitu antara aparat Kantor Camat Botumoito dengan masyarakat, guna mencapai suatu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Kemampuan aparat dalam melakukan komunikasi ini dapat dilihat pada adanya jalinan komunikasi baik vertikal maupun horizontal, yaitu baik dari atasan kepada bawahan maupun antara sesama bawahan dalam lingkungan kerja, dan adanya kebijakan pemerintah kecamatan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian perintah atasan dengan tupoksi kerja adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 5 orang atau 14,70%, responden yang menjawab sesuai 8 orang atau 23,52%, responden yang menjawab kurang sesuai 15 orang atau 44,11%, responden yang menjawab tidak

sesuai 6 orang atau 17,65%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3,35, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 11), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 3,23 - 4,03, dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesesuaian perintah atasan dengan tupoksi kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan komunikasi dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan tinggi atau pada kategori sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang komunikasi vertikal / horizontal dalam lingkungan kerja adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 11 orang atau 32,35%, responden yang menjawab sesuai 12 orang atau 35,29%, responden yang menjawab kurang sesuai 7 orang atau 20,58%, responden yang menjawab tidak sesuai 3 orang atau 8,82%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 1 orang atau 2,94%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3,85, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan, nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 3,23 - 4,03, dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori sesuai. Dengan demikian dapat diartikan

bahwa komunikasi vertikal / horizontal dalam lingkungan kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan komunikasi dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada tingkatan tinggi atau pada kategori sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan, distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian kebijakan pemerintah kecamatan dengan keinginan masyarakat adalah : responden yang menjawab sangat sesuai 2 orang atau 5,88%, responden yang menjawab sesuai 10 orang atau 29,41%, responden yang menjawab kurang sesuai 11 orang atau 32,35%, responden yang menjawab tidak sesuai 14 orang atau 20,58%, dan responden yang menjawab sangat tidak sesuai 4 orang atau 11,76%.

Untuk item pertanyaan ini diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 2,97, dan berdasarkan ketentuan skala range penilaian untuk masing-masing item pertanyaan (tabel 13), nilai skor rata-rata ini berada pada range antara 2,42- 3,22, dengan tingkatan sedang atau termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah kecamatan dengan keinginan masyarakat melalui indikator kemampuan melaksanakan komunikasi dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk pada sedang atau pada kategori kurang sesuai.

Setelah diperoleh nilai skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing item pertanyaan, selanjutnya skor rata-rata tersebut diakumulasikan dengan tujuan memperoleh nilai skor rata-rata untuk tiap-tiap indikator guna

mempermudah penilaian dan penarikan kesimpulan untuk tiap-tiap indikator maupun untuk variabel penelitian secara keseluruhan.

Berikut akumulasi analisis hasil penelitian :

AKUMULASI HASIL PENELITIAN

NO	INDIKATOR DAN KATEGORI JAWABAN	SKOR	KATEGORI
Kemampuan Merencanakan			
1	Perencanaan Anggaran Yang Sesuai Dengan Situasi dan Kondisi	3,23	Sesuai
2	Kesesuaian Perencanaan Anggaran dengan Kegiatan Alternatif	2,67	Kurang Sesuai
3	Kesesuaian Perencanaan Anggaran dengan Kebutuhan	3,26	Sesuai
	Skor Rata-Rata Indikator	3,05	Kurang Sesuai
Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan			
1	Kesesuaian Penempatan Aparatur dengan Jabatan Kerja	2,85	Kurang Sesuai
2	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	2,44	Kurang Sesuai
3	Kesesuaian Perencanaan dengan Hasil yang di Harapkan	2,91	Kurang Sesuai
	Skor Rata-Rata Indikator	2,73	Kurang Sesuai
Kemampuan Melakukan Komunikasi			
1	Kesesuaian Perintah Atasan dengan Tupoksi Kerja	3,35	Sesuai
2	Komunikasi Vertikal / Horizontal dalam Lingkungan Kerja	3,85	Sesuai
3	Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Kecamatan dengan Keinginan Masyarakat	2,97	Sesuai
	Skor Rata-Rata Indikator	3,39	Sesuai
	TOTAL SKOR RATA-RATA VARIABEL	3,06	Kurang Sesuai

Sumber : Data Tabel Hasil Kuesioner

Dari perolehan penilaian atas analisa hasil kuesioner tersebut,

dapat dilihat bahwa secara parsial memang terdapat perbedaan terhadap

perolehan nilai dari ketiga indikator, dimana pada indikator pertama dan indikator kedua ada pada tingkatan sedang dengan kategori kurang sesuai, namun pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa angka yang ditunjukkan berada pada tingkatan tinggi dengan kategori sesuai.

Secara simultan, jika ditarik perolehan nilai rata-ratanya menunjukkan angka 3,05 yang diartikan bahwa indikator-indikator yang dibahas pada penelitian ini menjadi faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito terutama pada indikator kemampuan merencanakan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan merencanakan dalam faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito kurang sesuai karena berada pada tingkatan sedang dengan kategori kurang sesuai, dengan skor 3,05.
2. Kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito factor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada pada tingkatan sedang dengan kategori kurang sesuai, dengan skor 2,73.
3. Kemampuan komunikasi dalam faktor-faktor penghambat

penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada pada tingkatan tinggi dengan kategori sesuai, dengan skor 3,39.

4. Secara parsial dari tiga indikator terdapat dua indikator yang menjadi faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito yakni kemampuan merencanakan dan kemampuan melaksanakan kerja, dan untuk kemampuan komunikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun secara simultan ketiga indikator tersebut ternyata menunjukkan angka skor sebesar 3,06 yang berarti berada pada tingkatan sedang dengan kategori kurang sesuai.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Penghambat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Camat Botumoito seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan merencanakan dengan mengikutsertakan para aparat/petugasnya untuk mengikuti berbagai pelatihan perencanaan.
2. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan mengikutsertakan para aparat kecamatan pada berbagai pelatihan sesuai dengan bidang

kerjanya, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kerja, disamping itu agar pimpinan melakukan pengawasan kontinu terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan.

3. Pada faktor kemampuan komunikasi agar lebih ditingkatkan terutama pada aspek pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Botumoito.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini.. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Cet. Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri.
- Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Penerjemah Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*, Pengantar Kata Warsito Utomo. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada kerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI)
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publio dan Masalah-Masalah Sosial*. Edisi Pertama, Cet. Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Riyadi dan Dedi Suprihadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta:: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S.P. 1999. *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*. Semarang: Satya Wacana
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (editor). 2011. *Metode Penelitian Survai*, Cet. Keempat. Jakarta: LP3ES.
- Simamora, Henry. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandak, Nugroho, dan Trilaksono. 2007. *“Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi”*. Cet. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing .

- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPF
- Suprihanto, John. 1996. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Pegawai*. Yogyakarta: BPF
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Syamsi, Ibnu. 1993. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 22 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005.
- Keputusan Bupati Boalemo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo.
- Profil Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo Tahun 2012

Dokumen Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang